

TESIS

**POLITIK HUKUM PEMBERLAKUAN PEMBATAHAN SOSIAL
PADA MASA PANDEMI COVID-19 DALAM PERSPEKTIF
*ECONOMIC ANALYSIS OF LAW***



OLEH :

**FAIRUZ ZAHIRAH ZIHNI HAMDAN, S.H.
NIM. 032014153008**

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
MINAT STUDI HUKUM PEMERINTAHAN
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA
2022**

**POLITIK HUKUM PEMBERLAKUAN PEMBATAAN SOSIAL
PADA MASA PANDEMI COVID-19 DALAM PERSPEKTIF
*ECONOMIC ANALYSIS OF LAW***

TESIS

**Diajukan Untuk Memperoleh Gelar Magister Hukum
Pada Program Studi Magister Ilmu Hukum
Minat Studi Hukum Pemerintahan Pada Fakultas Hukum
Universitas Airlangga**

Oleh :

FAIRUZ ZAHIRAH ZIHNI HAMDAN, S.H.

NIM. 032014153008

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
MINAT STUDI HUKUM PEMERINTAHAN
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA
2022**

MOTTO

Lakukan semua karena dan untuk Allah.

**Berusaha maksimal, bungkus dengan doa, ibadah,
ridho orang tua, dan berbuat kebaikan.**

LEMBAR PENGESAHAN

**Tesis ini telah disetujui,
Tanggal 7 Januari 2022**

Oleh

Dosen Pembimbing Utama



Dr. Rosa Ristawati, S.H., LL.M.
NIP. 197902172006042002

Dosen Pembimbing Kedua



Dr. Radian Salman, S.H., LL.M.
NIP. 197710192003121001

Mengetahui :

**Koordinator Program Studi Magister Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Airlangga**



Dr. Aktieva Tri Tjitrawati, S.H., M.Hum.
NIP. 96401071989032001

Tesis ini telah diuji dan dipertahankan di hadapan Panitia Penguji,

Pada tanggal 7 Januari 2022

PANITIA PENGUJI TESIS :

Ketua : Dr. Sukardi, S.H., M.H.

Anggota : 1. Prof. Dr. Tatiek Sri Djatmiati, S.H., M.S.

2. Dr. Radian Salman, S.H., LL.M.

3. Dwi Rahayu Kristianti, S.H., M.A.

4. Dr. Rosa Ristawati, S.H., LL.M.

PERNYATAAN ORISINALITAS TESIS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : FAIRUZ ZAHIRAH ZIHNI HAMDAN, S.H.
NIM : 032014153008
Bidang Minat : Hukum Pemerintahan – Tata Negara
Judul Tesis : Politik Hukum Pemberlakuan Pembatasan Sosial Pada Masa Pandemi Covid-19 dalam Perspektif *Economic Analysis Of Law*

dengan ini menyatakan bahwa :

1. Tesis saya ini adalah asli dan benar-benar hasil karya sendiri, dan bukan hasil karya orang lain dengan mengatas namakan saya, serta bukan merupakan hasil peniruan atau penjiplakan (*plagiarism*) dari hasil karya orang lain. Tesis ini belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik baik di Universitas Airlangga, maupun di Perguruan Tinggi lainnya;
2. dalam Tesis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dengan disebutkan nama pengarah dan dicantumkan dalam daftar kepustakaan;
3. pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya tulis Tesis ini, serta sanksi-sanksi lainnya sesuai dengan norma pengaturan yang berlaku di Universitas Airlangga.

Surabaya, 7 Januari 2022
Yang membuat pernyataan,



Fairuz Zahirah Zihni Hamdan, S.H.
NIM. 032014153008

ABSTRAK

Akhir tahun 2019 adalah awal dari penyebaran Covid-19. Pemerintah telah menetapkan Covid-19 sebagai bencana non-alam dan menentukan status darurat kesehatan masyarakat. Pandemi Covid-19 menyebabkan kesehatan masyarakat memburuk dan mengakibatkan kematian. Tidak hanya itu, pandemi Covid-19 juga secara signifikan memberikan dampak penurunan bagi perekonomian negara dan juga global. Pemerintah menerapkan kebijakan pembatasan sosial untuk menekan laju penyebaran Covid-19 sekaligus mengatasi dampak yang ditimbulkan oleh virus tersebut. Namun, pedoman yang dikeluarkan memperburuk ketidakstabilan berbagai sektor dan tumpang tindih dalam menerapkannya. Tesis ini untuk menganalisis keadaan darurat dan kebijakan hukum dalam penanggulangan pandemi pada masa pemberlakuan pembatasan sosial dan arah politik hukum pemberlakuan pembatasan sosial dalam perspektif *economic analysis of law*. Penelitian hukum yang dilakukan dalam tesis ini menggunakan pendekatan perundang-undangan untuk menemukan koherensi antara hukum dan peraturan terkait. Pendekatan konseptual juga digunakan untuk menemukan konsep hukum dalam konteks kekuasaan eksekutif, keadaan darurat negara, dan politik hukum. Penelitian dalam tesis ini juga dilakukan dengan menggunakan bantuan pendekatan ilmu sosial lainnya, yaitu *economic analysis of law*.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa keadaan darurat pandemi Covid-19 di Indonesia merupakan darurat kesehatan masyarakat berdasarkan UU Kekarantinaan Kesehatan 2018. Untuk memenuhi hak warga negara sekaligus menciptakan stabilitas negara, Pemerintah memberlakukan pembatasan sosial dengan mengeluarkan kebijakan hukum berupa Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM). Pemberian bantuan juga diberikan kepada masyarakat untuk mendukung kehidupan selama pembatasan sosial. Tujuan yang ingin dicapai oleh Pemerintah, dengan kata lain, politik hukum pembatasan sosial berupa PSBB dan PPKM adalah untuk meningkatkan kesehatan masyarakat dengan mengurangi laju penyebaran pandemi Covid-19 dan perlindungan ekonomi negara yang meliputi efektivitas, stabilitas, dan percepatan laju ekonomi negara selama pandemi Covid-19. Proteksi perekonomian merupakan wujud tanggung jawab negara terkait pandemi Covid-19. Agar pandemi Covid-19, kebijakan yang diambil harus benar-benar efektif dan efisien. Pemerintah perlu mengembangkan kebijakan hukum darurat di luar aspek kesehatan secara lebih konstruktif menuju efektif dan bermanfaat dengan mengurangi biaya sosial dan material, serta memprioritaskan hak konstitusional rakyat, mata pencaharian yang sangat layak dan sejahtera. Pemerintah juga perlu aktif mensosialisasikan peraturan perundang-undangan kepada masyarakat sebagai bentuk tanggung jawab dan akuntabilitas, bahwa salah satu tujuan menetapkan undang-undang dan kebijakan hukum untuk melawan pandemi Covid-19 adalah menstabilkan perekonomian negara.

Kata Kunci : Pembatasan Sosial, Politik Hukum, Perekonomian, *Economic Analysis of Law*

ABSTRACT

The end of 2019 is the beginning of the spread of Covid-19. The government has designated Covid-19 as a non-natural disaster, determining public health emergency status. The Covid-19 pandemic caused public health to deteriorate and resulting in death. Not only that, but the Covid-19 pandemic also significantly gives impacts the country's economy and global decline. The government implemented a policy of social restrictions to reduce the rate of spread of Covid-19 while addressing the impact caused by the virus. However, the guidelines issued aggravate the instability of various sectors and overlap in implementing it. This thesis is to analyze emergencies and legal policies in response to pandemics during the enactment of social restrictions and the political direction of the law of the enactment of social restrictions in the perspective of economic analysis of law. The legal research conducted in this thesis is using a statutory approach to find coherence between the related laws and regulations. A conceptual approach is also used to discover legal concepts in the context of executive power, state emergency, and legal politics. The research in this thesis is also conducted using the help of other social science approach, namely economic analysis of law.

The results showed that the state of emergency for the covid pandemics in Indonesia is a public health emergency under the Health Quarantine Law 2018. To fulfill citizens' rights while creating state stability, the Government imposed social restrictions by issuing Large-scale Social Restrictions (PSBB) and The Enactment of Restrictions on Community Activities (PPKM) legal policies. The provision of assistance follows this to the community to support life during social restrictions. The goal to be achieved by the Government, in other words, the legal politics of social restrictions in the form of PSBB and PPKM are to improve public health by reducing the rate of spread of the Covid-19 pandemic and the protection of the country's economy which includes the effectiveness, stability, and acceleration of the country's economic rate during the Covid-19 pandemic. Financial protection is a manifestation of state responsibilities related to the Covid-19 pandemic. In order for the Covid-19 pandemic, response policy has to be truly effective and efficient. The Government needs to develop emergency law policies outside the health aspects more constructively towards effective and beneficial by reducing social and material costs and prioritizing the constitutional rights of the people, incredibly decent and prosperous livelihoods. The government also needs to actively socialize laws and regulations to the community as a form of responsibility and accountability that establishing laws and legal policies to counter the Covid-19 pandemic is to stabilize the country's economy.

Keywords: *Social Restrictions, Legal Politics, Economy, Economic Analysis of Law*

DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebelum dan sesudah amandemen

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid- 19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang

Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dalam Rangka Percepatan Penanganan Covid-19

Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19)

Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non Alam Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) Sebagai Bencana Nasional

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19)

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 19 Tahun 2020 tentang Penyaluran dan Penggunaan Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, dan Dana Insentif Daerah Tahun Anggaran 2020 dalam Rangka Penanggulangan *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19)

Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/Menkes/239/2020 tentang Penetapan Pembatasan Sosial Berskala Besar di Wilayah Provinsi DKI Jakarta dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19)

Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/259/2020 tentang Penetapan Pembatasan Sosial Berskala Besar di Wilayah Kota Bandung, Kota Cimahi, Kabupaten Bandung, Kabupaten Bandung Barat, dan Kabupaten Sumedang dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19)

Keputusan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Agama, Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 03/KB/2021, Nomor 384 Tahun 2021, No. HK.01.08/MENKES/4242/2021, Nomor 440-717 Tahun 2021 tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran di Masa Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19)

Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor M.HH-03.GR.01.05 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-02.GR.01.05 Tahun 2021 tentang Jenis Kegiatan Orang Asing dalam Rangka Pemberian Visa Selama Masa Penanganan Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 dan Pemulihan Ekonomi Nasional

Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Untuk Pengendalian Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019

Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro dan Pembentukan Posko Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 di Tingkat Desa dan Kelurahan Untuk Pengendalian Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019

Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro dan Mengoptimalkan Posko Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 di Tingkat Desa dan Kelurahan Untuk Pengendalian Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019

Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro dan Mengoptimalkan Posko Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 di Tingkat Desa dan Kelurahan Untuk Pengendalian Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019

Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro dan Mengoptimalkan Posko Penanganan *Corona Virus Disease 2019* di Tingkat Desa dan Kelurahan Untuk Pengendalian Penyebaran *Corona Virus Disease 2019*

Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro dan Mengoptimalkan Posko Penanganan *Corona Virus Disease 2019* di Tingkat Desa dan Kelurahan Untuk Pengendalian Penyebaran *Corona Virus Disease 2019*

Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro dan Mengoptimalkan Posko Penanganan *Corona Virus Disease 2019* di Tingkat Desa dan Kelurahan Untuk Pengendalian Penyebaran *Corona Virus Disease 2019*

Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro dan Mengoptimalkan Posko Penanganan *Corona Virus Disease 2019* di Tingkat Desa dan Kelurahan Untuk Pengendalian Penyebaran *Corona Virus Disease 2019*

Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro dan Mengoptimalkan Posko Penanganan *Corona Virus Disease 2019* di Tingkat Desa dan Kelurahan Untuk Pengendalian Penyebaran *Corona Virus Disease 2019*

Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro dan Mengoptimalkan Posko Penanganan *Corona Virus Disease 2019* di Tingkat Desa dan Kelurahan Untuk Pengendalian Penyebaran *Corona Virus Disease 2019*

Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro dan Mengoptimalkan Posko Penanganan *Corona Virus Disease 2019* di Tingkat Desa dan Kelurahan Untuk Pengendalian Penyebaran *Corona Virus Disease 2019*

Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro dan Mengoptimalkan Posko Penanganan *Corona Virus Disease 2019* di Tingkat Desa dan Kelurahan Untuk Pengendalian Penyebaran *Corona Virus Disease 2019*

Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro dan Mengoptimalkan Posko Penanganan *Corona Virus Disease 2019* di Tingkat Desa dan Kelurahan Untuk Pengendalian Penyebaran *Corona Virus Disease 2019*

Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat *Corona Virus Disease 2019* di Wilayah Jawa dan Bali

Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat *Corona Virus Disease 2019* di Wilayah Jawa dan Bali

Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 4 *Corona Virus Disease 2019* di Wilayah Jawa dan Bali

Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 4 Dan Level 3 *Corona Virus Disease 2019* di Wilayah Jawa dan Bali

Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 4 *Corona Virus Disease 2019* di Wilayah Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku dan Papua

Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 3, Level 2, Dan Level 1 Serta Mengoptimalkan Posko Penanganan *Corona Virus Disease 2019* di Tingkat Desa dan Kelurahan Untuk Pengendalian Penyebaran *Corona Virus Disease 2019*

Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 4, Level 3, Dan Level 2 *Corona Virus Disease 2019* di Wilayah Jawa dan Bali

Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 4 *Corona Virus Disease 2019* di Wilayah Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku dan Papua

Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 3, Level 2, Dan Level 1 Serta Mengoptimalkan Posko Penanganan *Corona Virus Disease 2019* di Tingkat Desa dan Kelurahan Untuk Pengendalian Penyebaran *Corona Virus Disease 2019*

Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 4,3,2 *Corona Virus Disease 2019* di Wilayah Jawa dan Bali

Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 4 *Corona Virus Disease 2019* di Wilayah Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku dan Papua

Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 3, Level 2, Dan Level 1 Serta Mengoptimalkan Posko Penanganan *Corona Virus Disease 2019* di Tingkat Desa dan Kelurahan Untuk Pengendalian Penyebaran *Corona Virus Disease 2019*

Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 34 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 4, 3, 2 *Corona Virus Disease 2019* di Wilayah Jawa dan Bali

Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 4, 3, 2 *Corona Virus Disease 2019* di Wilayah Jawa dan Bali

Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 4 *Corona Virus Disease 2019* di Wilayah Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, dan Papua

Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 3, Level 2 Dan Level 1 Serta Mengoptimalkan Posko Penanganan *Corona Virus Disease 2019* di Tingkat Desa dan Kelurahan Untuk Pengendalian Penyebaran *Corona Virus Disease 2019*

Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 4,3,2 *Corona Virus Disease 2019* di Wilayah Jawa dan Bali

Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 4,3,2 *Corona Virus Disease 2019* di Wilayah Jawa dan Bali

Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 4 *Corona Virus Disease 2019* di Wilayah Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, dan Papua

Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 3, Level 2 Dan Level 1 Serta Mengoptimalkan Posko Penanganan *Corona Virus Disease 2019* di Tingkat Desa dan Kelurahan Untuk Pengendalian Penyebaran *Corona Virus Disease 2019*

Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 4,3,2 *Corona Virus Disease 2019* di Wilayah Jawa dan Bali

Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 4,3,2 *Corona Virus Disease 2019* di Wilayah Jawa dan Bali

Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan istilah Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 4,3,2,1 Serta Mengoptimalkan

Posko Penanganan *Corona Virus Disease 2019* di Tingkat Desa Dan Kelurahan Untuk Pengendalian Penyebaran *Corona Virus Disease 2019* Di Wilayah Sumatera, Nusa Tenggara, Kalimantan, Sulawesi, Maluku dan Papua

Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 4,3,2,1 *Corona Virus Disease 2019* di Wilayah Jawa dan Bali

Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 48 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan istilah Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 4,3,2,1 Serta Mengoptimalkan Posko Penanganan *Corona Virus Disease 2019* di Tingkat Desa Dan Kelurahan Untuk Pengendalian Penyebaran *Corona Virus Disease 2019* di Wilayah Sumatera, Nusa Tenggara, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, dan Papua

Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 3,2,1 *Corona Virus Disease 2019* di Wilayah Jawa Bali

Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 3, Level 2, Dan Level 1 Serta Mengoptimalkan Posko Penanganan *Corona Virus Disease 2019* di Tingkat Desa dan Kelurahan Untuk Pengendalian Penyebaran *Corona Virus Disease 2019* Di Wilayah Sumatera, Nusa Tenggara, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, dan Papua

Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 3,2,1 *Corona Virus Disease 2019* di Wilayah Jawa dan Bali

Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 33 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Penanganan *Corona Virus Disease 2019*

Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 51 Tahun 2020 tentang Pergul Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) Pada Masa Transisi Menuju Masyarakat Sehat, Aman, dan Produktif

Keputusan Gubernur DKI Jakarta Nomor 380 Tahun 2020 tentang Pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar di Wilayah Provinsi DKI Jakarta dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19)

Keputusan Gubernur DKI Jakarta Nomor 412 Tahun 2020 tentang Perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar di Wilayah Provinsi DKI Jakarta dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019

Keputusan Gubernur DKI Jakarta Nomor 489 Tahun 2020 tentang Perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar di Wilayah Provinsi DKI Jakarta dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019

Keputusan Gubernur DKI Jakarta Nomor 563 Tahun 2020 tentang Pemberlakuan, Tahapan, dan Pelaksanaan Kegiatan/Aktivitas Pembatasan Sosial Pada Masa Transisi Menuju Masyarakat Sehat, Aman, dan Produktif

Keputusan Gubernur DKI Jakarta Nomor 647 Tahun 2020 tentang Perpanjangan Pemberlakuan, Tahapan, dan Pelaksanaan Kegiatan/Aktivitas Pembatasan Sosial Berskala Besar Pada Masa Transisi Menuju Masyarakat Sehat, Aman, dan Produktif

Keputusan Gubernur DKI Jakarta Nomor 735 Tahun 2020 tentang Perpanjangan Pemberlakuan, Tahapan, dan Pelaksanaan Kegiatan/Aktivitas Pembatasan Sosial Berskala Besar Pada Masa Transisi Menuju Masyarakat Sehat, Aman, dan Produktif

Keputusan Gubernur DKI Jakarta Nomor 805 Tahun 2020 tentang Perpanjangan Pemberlakuan, Tahapan, dan Pelaksanaan Kegiatan/Aktivitas Pembatasan Sosial Berskala Besar Pada Masa Transisi Menuju Masyarakat Sehat, Aman, dan Produktif

Keputusan Gubernur DKI Jakarta Nomor 853 Tahun 2020 tentang Perpanjangan Pemberlakuan, Tahapan, dan Pelaksanaan Kegiatan/Aktivitas Pembatasan Sosial Berskala Besar Pada Masa Transisi Menuju Masyarakat Sehat, Aman, dan Produktif

Keputusan Gubernur DKI Jakarta Nomor 879 Tahun 2020 tentang Perpanjangan Pemberlakuan, Tahapan, dan Pelaksanaan Kegiatan/Aktivitas Pembatasan Sosial Berskala Besar Pada Masa Transisi Menuju Masyarakat Sehat, Aman, dan Produktif

Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 443/Kep.240-Hukham/2020 tentang Pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar di Wilayah Kota Bandung, Kota Cimahi, Kabupaten Bandung, Kabupaten Bandung Barat, dan Kabupaten Sumedang dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19)

Surat Edaran Gubernur Bali Nomor 01 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Masyarakat dalam Tatahan Kehidupan Era Baru di Provinsi Bali

Surat Edaran Gubernur Bali Nomor 02 Tahun 2021 tentang Perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat dalam Tatahan Kehidupan Era Baru di Provinsi Bali

Surat Edaran Gubernur Bali Nomor 05 Tahun 2021 tentang Perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro dan Pembentukan Posko Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 di Tingkat Desa dan Kelurahan Untuk Pengendalian Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019

Surat Edaran Gubernur Bali Nomor 06 Tahun 2021 tentang Perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro dan Pembentukan Posko Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 di Tingkat Desa dan Kelurahan Untuk Pengendalian Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019

Surat Edaran Gubernur Bali Nomor 07 Tahun 2021 tentang Perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro dan Pembentukan Posko Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 di Tingkat Desa dan Kelurahan Untuk Pengendalian Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019

Surat Edaran Gubernur Bali Nomor 09 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat *Corona Virus Disease* 2019 dalam Tatanan Kehidupan Era Baru di Provinsi Bali

Surat Edaran Gubernur Bali Nomor 9R Tahun 2021 tentang Penegasan Batas Jam Operasional

Surat Edaran Gubernur Bali Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat *Corona Virus Disease* 2019 dalam Tatanan Kehidupan Era Baru di Provinsi Bali

Surat Edaran Gubernur Bali Nomor 11 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 3 *Corona Virus Disease* 2019 dalam Tatanan Kehidupan Era Baru di Provinsi Bali

Surat Edaran Gubernur Bali Nomor 13 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 4 *Corona Virus Disease* 2019 dalam Tatanan Kehidupan Era Baru di Provinsi Bali

Surat Edaran Gubernur Bali Nomor 14 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 4 *Corona Virus Disease* 2019 dalam Tatanan Kehidupan Era Baru di Provinsi Bali

Surat Edaran Gubernur Bali Nomor 15 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat *Corona Virus Disease* 2019 dalam Tatanan Kehidupan Era Baru di Provinsi Bali

Surat Edaran Gubernur Bali Nomor 18 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat *Corona Virus Disease* 2019 dalam Tatanan Kehidupan Era Baru di Provinsi Bali

Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 14 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Penanganan *Corona Virus Disease* 2019

Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 16 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 14 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Penanganan *Corona Virus Disease* 2019

Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Penanganan *Corona Virus Disease* (COVID-19)

Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 23 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) di Kota Bandung

Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 29 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) di Kota Bandung

Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 34 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) di Kota Bandung

Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 37 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Adaptasi Kebiasaan Baru dalam Rangka Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19)

Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 73 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 37 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Adaptasi Kebiasaan Baru dalam Rangka Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19)

Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar Secara Proporsional dalam Rangka Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19)

Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar Secara Proporsional dalam Rangka Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19)

Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar Secara Proporsional dalam Rangka Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19)

Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar Secara Proporsional dalam Rangka Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19)

Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 28 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar Secara Proporsional dalam Rangka Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19)

Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 37 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar Secara Proporsional dalam Rangka Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19)

Surat Edaran Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Nomor 20 Tahun 2021 tentang Protokol Kesehatan Perjalanan Internasional Pada Masa Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19)

International Covenant on Economic, Social, and Cultural Rights (ICESCR)

International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR)

ASEAN Human Rights Declaration

DAFTAR PUTUSAN PENGADILAN

Putusan Mahkamah Konstitusi No. 003/PUU-III/2005 tentang Pengujian Materiil dan Formil atas Undang-undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945

Putusan Mahkamah Konstitusi No. 138/PUU-VII/2009 tentang Pengujian Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Timeline Perpanjangan PSBB Transisi Fase 1 Provinsi DKI Jakarta.....	48
Tabel 2 Perbandingan PSBB, PSBB Transisi Fase 1, dan PSBB Versi 2 Provinsi DKI Jakarta	51
Tabel 3 Timeline Perubahan PSBB Versi 2 Kota Bandung.....	55
Tabel 4 Timeline Perubahan PSBB Secara Proporsional Kota Bandung	57
Tabel 5 Perbandingan PSBB, PSBB Versi 2, dan PSBB Secara Proporsional Kota Bandung	58
Tabel 6 Timeline Perpanjangan PPKM Mikro Tingkat Nasional.....	65
Tabel 7 Daftar Instruksi Menteri Dalam Negeri (Inmendagri) tentang Penerapan PPKM Per Level	69
Tabel 8 Perbandingan PPKM, PPKM Mikro, PPKM Darurat, PPKM Level 1-4 Tingkat Nasional.....	74
Tabel 9 Timeline Perpanjangan PPKM Mikro Berbasis Desa dan Kelurahan Provinsi Bali.....	80
Tabel 10 Perbandingan PPKM, PPKM Mikro, PPKM Darurat, PPKM Level 3, PPKM Level 4, PPKM Versi 2, dan PPKM Versi 3 Provinsi Bali.....	85
Tabel 11 Daftar Negara yang Diperbolehkan Masuk Provinsi Bali	95

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Grafik Perbandingan Pengangkutan Penumpang Transportasi Umum DKI Jakarta Pasca PSBB.....	108
Gambar 2 Grafik Jumlah Pengunjung Destinasi Wisata DKI Jakarta Selama PSBB	109
Gambar 3 Grafik Jumlah Wisatawan di Kota Bandung Tahun 2018-2020	112
Gambar 4 Grafik Perekonomian Indonesia Pasca PSBB 2020.....	113
Gambar 5 Grafik Penumpang Transportasi Umum Indonesia Pasca PSBB 2020	113
Gambar 6 Grafik Wisatawan Domestik dan Mancanegara di Indonesia Pasca PSBB 2020.....	114
Gambar 7 Grafik Kunjungan Wisata Mancanegara Provinsi Bali Pasca PPKM 2021	118
Gambar 8 Grafik Pengguna Transportasi Provinsi Bali Pasca PPKM 2021.....	119
Gambar 9 Grafik Perekonomian Indonesia Pasca PPKM 2021.....	120
Gambar 10 Grafik Jumlah Kunjungan Wisatawan Mancanegara ke Indonesia Pasca PPKM 2021	120
Gambar 11 Grafik Penumpang Transportasi Indonesia Pasca PPKM 2021	121

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur ke hadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, serta senantiasa memberikan kesehatan, kesempatan, kekuatan kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini tepat pada waktunya dengan judul “Politik Hukum Pemberlakuan Pembatasan Sosial Pada Masa Pandemi Covid-19 dalam Perspektif *Economic Analysis Of Law*” dengan baik. Tesis ini disusun guna memenuhi salah satu persyaratan memperoleh gelar Magister Hukum di Fakultas Hukum Universitas Airlangga.

Penulis menyadari bahwa penulisan tesis ini tidak akan terlaksana tanpa adanya bimbingan serta dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya atas dorongan semangat, doa, serta dukungan moral maupun materi, kepada:

1. Orang tua penulis, Hamdan, S.H. dan Lelia Handayani Sabda Mulia, S.H., juga kakak dan adik penulis, Nabilah Ghassani Hamdan, dan Aisyah Hasna Zakiyyah Hamdan, serta keluarga besar;
2. Ibu Dr. Rosa Ristawati, S.H., LL.M. dan Bapak Dr. Radian Salman, S.H., LL.M. selaku Dosen Pembimbing Tesis;
3. Para Dosen Penguji tesis penulis, Dr. Sukardi, S.H., M.H., Prof. Dr. Tatiek Sri Djatmiati, S.H., M.S., dan Ibu Dwi Rahayu Kristianti, S.H., M.A.;
4. Ibu Dr. Aktieva Tri Tjitrawati, S.H., M.Hum. selaku Koordinator Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Airlangga beserta jajarannya;

5. Ibu Dr. Lina Hastuti, S.H., M.H. selaku Dosen Wali penulis;
6. Seluruh Dosen, Staf Pengajar, serta karyawan Fakultas Hukum Universitas Airlangga;
7. Sahabat penulis sejak SMP, Ella, Aning, dan Dinda;
8. Sahabat penulis sejak SMA khususnya Aisyah, Asa, Adel, serta sahabat ECCITASO lainnya;
9. Sahabat penulis yang telah meninggalkan penulis terlebih dahulu, Alm. Excel Genius Darmawan dan Almh. Nadya Firsya Ramadhani;
10. Sahabat penulis sejak OSPEK JUSTITIA 2016, Fariz Mauldiansyah, S.H. dan Brawijaya B. Kusuma, S.H.;
11. *My another human diary* sejak awal kuliah, Vermonita Dwi Caturjayanti, S.H, (*soon to be* M.H.);
12. Sahabat seperantauan seperjuangan, Anjas Putra Pramudito, S.H. (*soon to be* M.H.);
13. Sahabat AYAM GEPREK FH UA, Memed, Rici, Iwa, Vivik, Vernon, Kakak Putri Riska, Krisna, Bram, dan Ilham;
14. Kawan-kawan UpayaHukum yakni Rizal Ramadhani Nusi, S.H. (*soon to be* M.H.), Balma Ariagana, S.H., Fariz Mauldiansyah, S.H., dan juga Raissa.
15. Tiga penyemangat setia penulis, Alif Nabila, Clara Renny, dan Silvania Soviana;
16. Seluruh pihak yang telah membantu penulis dalam penyusunan tesis ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu. Terima kasih atas bantuan, kerja sama, dan dukungan serta doanya.

Penulis menyadari bahwa masih terdapat banyak kekurangan dalam penyusunan tesis ini. Oleh karena itu, kritik dan saran yang sifatnya membangun akan sangat diterima dengan senang hati oleh penulis. Akhir kata, penulis berharap semoga tesis ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak.

Surabaya, 7 Januari 2022

Penulis,

Fairuz Zahirah Zihni Hamdan, S.H.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	ii
MOTTO	iii
LEMBAR PENGESAHAN	iv
PERNYATAAN ORISINALITAS TESIS	vi
ABSTRAK	vii
ABSTRACT	viii
DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN.....	ix
DAFTAR PUTUSAN PENGADILAN	xxi
DAFTAR TABEL	xxii
DAFTAR GAMBAR.....	xxiii
KATA PENGANTAR.....	xxiv
DAFTAR ISI.....	xxvii
BAB I - PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang dan Rumusan Masalah.....	1
1.2 Tujuan	8
1.3 Manfaat Penelitian	8
1.4 Tinjauan Pustaka.....	9
1.4.1 Kekuasaan Eksekutif	9
1.4.2 Teori Negara Darurat (<i>State Emergency</i>).....	12
1.4.3 Politik Hukum	14
1.4.4 Teori <i>Economic Analysis of Law</i>	17
1.5 Metode Penelitian	21
1.5.1 Tipe Penelitian Hukum	21

1.5.2	Pendekatan	22
1.5.3	Sumber Bahan Hukum	23
1.5.4	Metode Pengumpulan Bahan Hukum	25
1.5.5	Analisis Bahan Hukum	26
1.6	Sistematika Penelitian	26
BAB II - KEADAAN DARURAT DAN KEBIJAKAN HUKUM DALAM		
PENANGGULANGAN PANDEMI PADA MASA		
PEMBERLAKUAN PEMBATASAN SOSIAL		
2.1	Keadaan Darurat Menurut Peraturan Perundang-undangan dalam Situasi Darurat Kesehatan Pandemi Covid-19.....	29
a.	Keadaan Darurat Menurut Konstitusi	29
b.	Keadaan Darurat Pada Masa Pandemi Covid-19 Menurut Peraturan Perundang-undangan di Indonesia	34
c.	Penetapan Pandemi Covid-19 Sebagai Kedaruratan Kesehatan di Indonesia	36
2.2	Upaya Pemerintah dalam Pemenuhan Kewajiban Konstitusional Penanggulangan Pandemi Covid-19.....	41
a.	Kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar	43
1.	Kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar Tingkat Nasional	43
2.	Kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar Tingkat Daerah	45
b.	Kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat	61
1.	Kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Tingkat Nasional.....	62
2.	Kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Tingkat Daerah	79

BAB III - ARAH POLITIK HUKUM PEMBERLAKUAN PEMBATASAN SOSIAL DALAM PERSPEKTIF ECONOMIC ANALYSIS OF LAW.....	97
3.1 Teori <i>Economic Analysis of Law</i> dalam Perumusan Suatu Kebijakan ...	97
3.2 Prioritas Negara dalam Penanggulangan Pandemi Covid-19	101
3.3 Politik Hukum Pemberlakuan Pembatasan Sosial	105
a. Analisis Kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar	105
b. Analisis Kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat	115
c. Arah Politik Hukum Pemberlakuan Pembatasan Sosial dalam Penanggulangan Pandemi Covid-19	123
BAB IV – PENUTUP	129
4.1 Kesimpulan	129
4.2 Saran	130
DAFTAR BACAAN	xxx